



RILIS
KUNJUNGAN KERJA (KUNKER) SPESIFIK KOMISI I DPR RI
KE NATUNA, KEPULAUAN RIAU
16-18 JANUARI 2020

Dalam Kunker Spesifik Komisi I DPR RI ke Natuna, Kepulauan Riau pada tanggal 16-18 Januari 2020, Tim Kunker melaksanakan pertemuan dengan Pangkocabwilhan I, Laksamana Madya Yudo Margono; Direktur Operasi Laut Bakamla, Laksamana Pertama N.S. Embun; Pangkoarmada I, Laksamana Muda Muhammad Ali; Dandim 0318/Natuna Letkol (Czi) Ferry Kriswardana; Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal; dan dan sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Natuna.

Kunker Spesifik Komisi I DPR RI ke Natuna, Kepulauan Riau dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Viada Hafid. Dalam Kunker Spesifik ini, Komisi I DPR RI ingin mengetahui kondisi terkini serta memastikan pengamanan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) tetap diaktifkan.

“Kami dalam rangka fungsi pengawasan, memberikan *support* kepada Mitra kami, baik dari TNI maupun Bakamla yang sudah siaga bekerja menjaga wilayah perairan kita,” kata Meutya di sela-sela memimpin Tim Kunker Spesifik Komisi I DPR RI meninjau perairan Natuna Utara dengan menggunakan Kapal Bakamla, KN Tanjung Datu, Kepri, Kamis (16/1/2020).

Selain memastikan perairan Natuna bersih dari aktivitas pencurian ikan oleh kapal nelayan Tiongkok, Tim Kunker Spesifik Komisi I DPR RI ke Natuna ini juga ingin memetakan kekuatan ideal yang dibutuhkan TNI dan Bakamla untuk mengamankan perairan Indonesia, khususnya Natuna dan sekitarnya.

Komisi I DPR RI ingin mendalami jumlah personel, teknologi radar, dan alutsista yang dikerahkan TNI dalam menjaga NKRI. Tujuannya untuk memastikan bagaimana pengawasan dan pengamanan TNI, serta Bakamla di wilayah perairan Indonesia yang sering dimasuki kapal asing.

Terkait hal itu, Pemerintah perlu menambah armada kapal yang khusus untuk menjaga Natuna Utara. Mengingat, luasan wilayah perairan Natuna yang tidak hanya bersinggungan dengan Laut Cina Selatan, tetapi juga perbatasan laut ZEE negara tetangga, seperti Filipina dan Vietnam.

Dalam kerangka legislasi dan dukungan anggaran, Komisi I DPR RI akan mendiskusikan soal penambahan anggaran khusus pengamanan di Natuna dan sekitarnya. Komisi I DPR RI juga sedang mempelajari peraturan yang perlu dilengkapi terutama untuk penguatan posisi Bakamla sebagai keamanan laut. Komisi I DPR RI mendorong segera direvisinya Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) tentang persenjataan standar yang perlu dimiliki Bakamla, sebagaimana Coast Guard negara lain. Sementara dalam jangka panjang, Komisi I DPR RI akan mengakselerasi agar RUU Keamanan Laut (Kamla) menjadi RUU Prioritas Dewan.

Natuna, 18 Januari 2020

Tim Kunker Spesifik Komisi I DPR RI ke Kepulauan Riau